

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
4. Tinjauan Pustaka	7
4.1. Konsep Kontrak Pada Umumnya	8
4.2. Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ)	9
4.3. Perlindungan Hukum	15
4.4. Investasi	18
5. Metode Penelitian	25
5.1. Tipe Penelitian	25
5.2. Pendekatan Penelitian	26
5.3. Sumber Bahan Hukum	27
5.4. Analisa Bahan Hukum	27

6. Sistematika Penulisan	28
BAB II KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA INVESTASI DI PROVESTY DENGAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH.....	30
1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.....	30
2. Pada Pihak yang Terlibat dalam Investasi di Provesty dengan Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ).....	34
3. Kepemilikan Atas Properti Pada Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Di Provesty	42
4. Hubungan Hukum Antara Para Pihak.....	48
BAB III TANGGUNG GUGAT PENERIMA PEMBIAYAAN (FLIPPER) DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI BIDANG PERUMAHAN	69
1. Risiko dalam Berinvestasi	69
2. Upaya Provesty dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan.....	70
3. Tanggung Gugat Penerima Pembiayaan (<i>Flipper</i>) Bilamana Terjadi Ingkar Janji Dalam Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	72
BAB IV PENUTUP.....	86
1. Kesimpulan	86
2. Saran	90
DAFTAR BACAAN.....	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Fitur Produk Akad <i>Musyarakah mutanaqisah</i>	13
Tabel 2. Mekanisme Akad Pembiayaan Provesty Flipping Rumah.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Hukum Provesty.....	4

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1847-23)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.